



### **Strategi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Kekuatan Partisipasi Masyarakat Tani di Desa Tumih**

*The Potency of the Tumih Village Farmer Community's Participation in the Agricultural Development Planning Strategy*

**Surti<sup>1)</sup> Syahrial Shaddiq<sup>2)</sup> Ahmad Suhaimi<sup>3)</sup> Muhammad Helmy Abdillah<sup>4)</sup>**

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Ahmad Yani<sup>1)</sup>

Program Studi Manajemen, Universitas Cahaya Bangsa<sup>2)</sup>

Program Studi Agribisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai<sup>3)</sup>

Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan, Politeknik Hasnur<sup>4)</sup>

e-mail: [surti.uay@gmail.com](mailto:surti.uay@gmail.com)

Disubmit: 15 Agustus 2022; Direvisi; 22 September 2022; Dipublish; 4 Oktober 2022

#### **Abstract**

*In Tumih Village, Wanaraya District, Barito Kuala Regency, South Kalimantan Province, this study attempts to assess the strategy and growth of the agricultural sector as well as the level of community engagement in relation to agriculture. The settlement of Tumih itself has excellent potential for agriculture, particularly rice production. The analytical technique used employs the Strength Field Analysis approach to identify development plans and Participation Strength Analysis to identify the level of community involvement in agriculture in Tumih Village while determining the agricultural sector's strategy. The analysis' findings indicate that the key influencing elements for agricultural development plans in Tumih Village are the availability of human resources in the agricultural sector, particularly in the case of rice, and the farmers' receptivity to new technology. A hindrance in Tumih Village is the absence of irrigation and agricultural technologies. With only 36.5 percent, the assessment of the level of community involvement in planning for agricultural growth is still insufficient.*

**Keywords** : Agricultural Development; Welfare; Farmer Income; Analysis Field of Strength; Power of Participation.

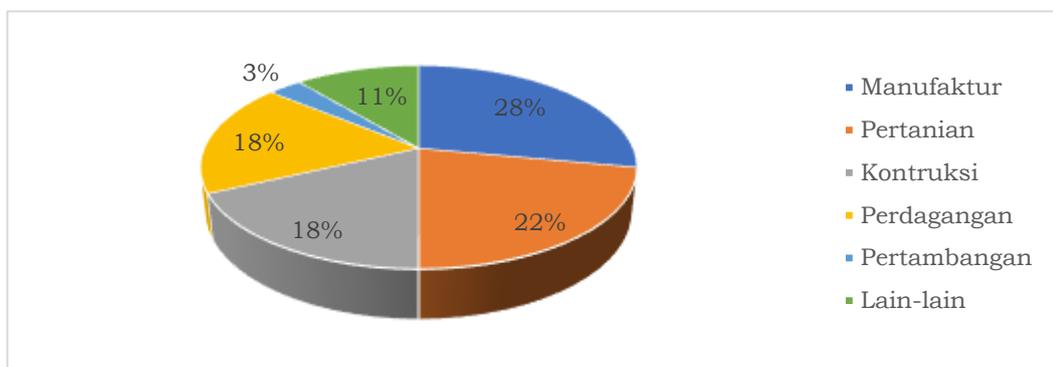
### Abstrak

Penelitian ini mencoba menganalisis strategi dan pengembangan sektor pertanian serta kekuatan partisipasi masyarakat terkait pertanian di Desa Tumih, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa Tumih sendiri memiliki potensi pertanian yang besar, khususnya pertanian padi. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan pendekatan Analisis Medan Kekuatan untuk menentukan strategi dalam pembangunan dan Analisis Kekuatan Partisipasi untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat terkait pertanian di Desa Tumih dalam perencanaan sektor pertanian. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia di sektor pertanian khususnya padi dan keterbukaan petani terhadap teknologi baru menjadi faktor pendorong utama terkait perencanaan pembangunan pertanian di Desa Tumih. Sementara itu, minimnya irigasi dan teknologi pertanian di Desa Tumih menjadi faktor penghambat. Penilaian kekuatan partisipasi masyarakat terkait pertanian dalam perencanaan pembangunan pertanian masih lemah yaitu hanya 36,5 persen.

**Kata Kunci:** Pembangunan Pertanian; Kesejahteraan; Pendapatan Petani; Analisis Medan Kekuatan; Kekuatan Partisipasi.

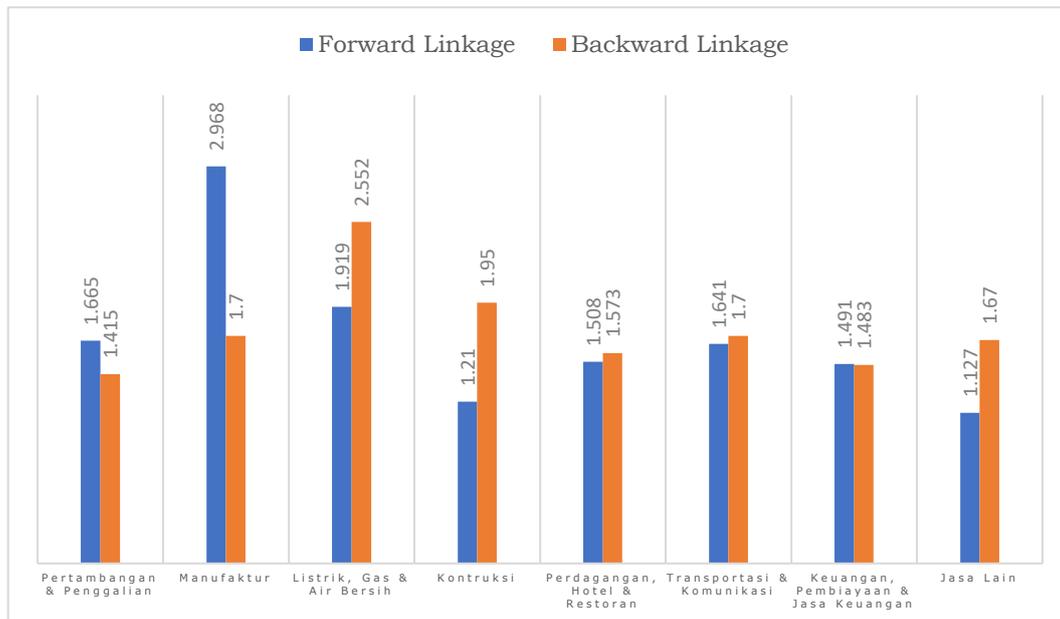
## 1. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini mengalami perubahan di sektor pertanian yang mengarah ke sektor diluar pertanian. Dampak dari kondisi ini membuat meningkatnya tekanan terhadap pemanfaatan lahan pertanian ditandai dengan meningkatnya konversi lahan pertanian (Handoyo, 2010). Sektor pertanian juga memiliki andil yang sangat besar dalam pemenuhan ketahanan pangan nasional serta sebagai bahan baku bagi kelangsungan aktivitas sektor lainnya, pelestarian lingkungan, hingga menjadi instrumen unik dalam peranannya untuk membangun negara (Susilowati *et al*, 2010). Menurut Todaro (2011) sektor pertanian sangat bermanfaat dalam hal penyerapan tenaga kerja dan menjadi sumber pendapatan sebagian besar masyarakat di negara berkembang. Di Indonesia sektor pertanian memiliki jumlah pekerja terbesar kedua setelah sektor Industri pengolahan seperti yang dijelaskan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1 Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Ekonomi Utama; Tahun 2020  
Sumber: Badan Pusat Statistik, Februari 2021 (diolah)

Selain menyerap tenaga kerja cukup besar, keterkaitan sektor pertanian dengan sektor lainnya juga dapat dikatakan tinggi. Data dari tabel *input-output* Indonesia 2010 diketahui sektor pertanian memiliki *forward* dan *backward linkage* yang tinggi dengan sektor lainnya.



Gambar 2 Keterkaitan Sektor Pertanian dengan Sektor Lainnya; Tahun 2010  
Sumber: Tabel Input-Output Indonesia Tahun 2010 (data diolah)

Gambar 2 menjelaskan adanya potensi yang besar dari sektor pertanian dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi lain dimana nilai seluruh keterkaitan ke depan dengan sektor lain lebih dari 1 (satu). Pengembangan di sektor pertanian baik langsung dan tidak langsung paling berdampak positif adalah bagi Industri pengolahan dimana nilai keterkaitan ke depannya sebesar 2,968 atau yang tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Seperti pada gambar 1 yang menunjukkan sektor Industri pengolahan memiliki jumlah tenaga kerja terbesar di Indonesia. Sehingga pengembangan sektor pertanian juga akan berdampak positif bagi sektor pengolahan dan menjamin 28% pekerja di sektor ini untuk tetap memiliki mata pencaharian. Meski demikian, strategi peningkatan sektor pertanian tidaklah mudah dikarenakan rentannya sektor ini terhadap perubahan iklim global yang buruk yang menyebabkan produksi komoditas pertanian menurun (Steg, 2005). Hal yang sama dikemukakan Cline (2007) masalah perubahan iklim menjadi ancaman bagi seluruh lini kehidupan manusia tidak terkecuali sektor pertanian. Perubahan musim yang tidak menentu memicu kesulitan bagi petani dalam melakukan proses bertani menjadi tidak tepat waktu dan berimbas pada menurunnya produksi pertanian sementara permintaan tidak berubah. Menurut (Rosenzweig & Parry, 1994) Negara berkembang cenderung mendapat dampak yang lebih besar terkait perubahan iklim yang tidak menentu ini, khususnya negara tropis, seperti Indonesia. Para ahli melakukan prediksi seperti yang dinyatakan oleh (Mendelsohn, 2008) bahwa penurunan produktivitas pertanian sebesar 20% akan melanda Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Di lain sisi Rahadian (2010) mengatakan bahwa meningkatnya pengelolaan lahan pertanian dalam bentuk bagi hasil atau status petani sebagai penggarap dan bukan pemilik lahan dapat menyulitkan dan inefisien dalam proses penyuluhan tani serta keberlanjutan program pemerintah lainnya. Selain itu, jika dilihat secara mikro, sarana prasarana yang terbatas menjadi penyebab menurunnya pengembangan dan

pembangunan daya saing pada sektor pertanian (Ramlawati, 2020). Pembangunan pertanian sendiri belum mampu mengintegrasikan kekuatan pemerintah dan kekuatan masyarakat dalam perencanaan pembangunannya. Bukti empiris yang dijelaskan Mellor (2001) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pertanian masih diabaikan. Lebih lanjut Yonis (2016) menyatakan pendekatan perencanaan partisipatif juga belum menjadi kekuatan dalam sektor pertanian dimana peranan masyarakat bersifat sementara dan tidak berkelanjutan dalam setiap program pemerintah. Oleh karena itu, strategi yang tepat dan efektif perlu dirumuskan dalam upaya pengembangan sektor pertanian. Menurut Chambers (1996) pendekatan partisipatif akan berdampak baik terhadap kualitas perencanaan dan keberlanjutan pelaksanaan program dari perencanaan tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mengentaskan kemiskinan pada cakupan lokal dengan harapan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia secara luas.

Pendekatan perencanaan partisipatif diperlukan guna mengetahui potensi lokal suatu daerah dengan menggunakan metode top-down dipadukan dengan metode bottom-up atau menggunakan pendekatan ilmiah dengan ditunjang pendekatan praktis lainnya serta pendekatan on-farm maupun out-farm. Pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif dalam bentuk apapun tentunya harus diimbangi dengan tersedianya akses informasi agar masyarakat dapat berinteraksi dalam proses perencanaan. Ada beberapa aspek penilaian dalam mengukur kekuatan partisipasi masyarakat terkait pertanian dalam sebuah perencanaan pertanian, seperti yang disampaikan peneliti (Yonis, 2016).

Tabel 1 Indikator Penentuan Kekuatan Partisipasi Masyarakat terkait Pertanian dalam Perencanaan Pembangunan Pertanian

<b>Aspek Penting</b>	<b>Deskripsi/Indikator</b>
Keluasan Partisipasi	1. Luasnya/Kuantitas keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam perencanaan pembangunan pertanian
Kedalaman Partisipasi	1. Jumlah dan keragaman <i>stakeholder</i> yang berpartisipasi 2. Kedalaman/Kualitas keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam proses perencanaan pembangunan pertanian
Saluran Partisipasi	1. Peran dan kontribusi <i>stakeholder</i> dalam proses perencanaan pembangunan pertanian 2. Penggunaan saluran dan media informasi yang melibatkan <i>stakeholder</i> dalam perencanaan pembangunan pertanian
Keterpaduan Partisipasi	1. Penggunaan forum perencanaan maupun penggunaan media komunikasi dan informasi dalam perencanaan pembangunan pertanian 2. Kerjasama antara seluruh <i>stakeholder</i> dalam perencanaan pembangunan pertanian. 3. Dapat dilihat dari data dan informasi baik berupa rencana dan program, pelaksanaan yang bersinergi, dan pasca pelaksanaan rencana pembangunan.

Sumber: Yonis, 2016

Berbicara mengenai kelompok tani, maka di Indonesia memiliki banyak sekali kelompok tani dengan sejumlah penyuluh pertanian yang telah ditunjuk pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas para petani dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat tani yang meningkat. Namun banyak tantangan yang dihadapi para kelompok tani dalam usaha peningkatan produktivitas tersebut. Seperti yang di alami kelompok tani di Desa Tumih, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dimana sebagian besar masyarakatnya belum mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui sektor

pertanian. Sektor pertanian di Desa Tumih sangat potensial untuk dikembangkan, disamping lahan yang cocok untuk pertanian seperti padi, jeruk, karet dan palawija, sumber daya manusia dengan keahlian dalam mengelola pertanian juga cukup melimpah yakni hampir 86% warga Desa Tumih berprofesi sebagai petani. Berada dalam kabupaten penghasil produk pertanian terbesar di Kalimantan Selatan, ternyata tidak serta merta membuat sektor pertanian di Desa Tumih berkembang sesuai harapan dimana masih sedikit petani di temoat ini yang memiliki pendapatan yang tergolong tinggi. Melihat hal tersebut, maka perlu adanya strategi dalam pengembangan sektor pertanian demi peningkatan sektor-sektor lain (Sihombing, 2022).

Berdasarkan pemaparan diatas, tujuan penelitian dapat dirumuskan menjadi: 1) Menganalisis potensi pertanian yang ada pada Kelompok Tani di Desa Tumih selain pertanian padi, 2) Membuat strategi pengembangan pertanian di Desa Tumih yang optimal dan berkelanjutan menggunakan *Force Field Analysis* (FFA). FFA adalah metode yang sangat unggul dan ampuh untuk memperoleh gambaran lengkap yang holistik dari berbagai kekuatan yang ada dalam isu utama suatu kebijakan juga untuk memperkirakan sumber dan tingkat kekuatan tersebut. Penelitian terdahulu dengan analisis FFA diantaranya oleh (Norona *et al*, 2022). Dimana ditemukan bahwa strategi pembangunan partisipatif berdampak positif terhadap pembangunan pertanian. 3) Menganalisis kekuatan partisipasi masyarakat terkait pertanian dalam perencanaan pembangunan pertanian di Desa Tumih, menggunakan Analisis kekuatan Partisipasi, yang juga pernah digunakan peneliti lain yakni Pratiwi (2015). Dimana Tingkat partisipasi masyarakat Desa Pulutan dalam perencanaan Desa tergolong tinggi dan berdampak dengan tingginya produktivitas khususnya di sektor perkebunan di Desa ini.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini data yang digunakan bersumber dari data primer berupa hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan kuisioner yang diperoleh dari *key responden* ditambah masyarakat terkait pertanian di Desa Tumih. Kemudian data sekunder berupa laporan dan pertanggungjawaban kelompok tani, pemerintah Desa Tumih, UPTD pertanian Kecamatan Wanaraya, dan SKPD pertanian Kabupaten Barito Kuala, hasil data statistik, monografi wilayah dan sumber data lain yang relevan. Untuk menjawab masalah pertama penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif melalui pengamatan langsung, observasi dan wawancara terkait potensi Desa Tumih di bidang pertanian. Kemudian tujuan kedua penelitian menggunakan analisis *Force Field Analysis* (FFA) atau Analisis Medan Kekuatan. Dalam analisis FFA ada beberapa tahapan analisis (Sianipar & Entang, 2003):

1. Menganalisis isu sosial, ekonomi, aspek input-output, pasar, teknis, dan sistem panen dengan metode self selling dan tebang.
2. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat pembangunan pertanian (*resisting strength*).
3. Menyusun skala prioritas faktor pendorong dan penghambat.  
Keberhasilan tujuan tergantung penilaian setiap faktor pendorong dan penghambat berdasarkan aspek-aspek penilaian sebagai berikut (Sianipar & Entang, 2003):
  1. Kepentingan faktor terhadap tujuan pembangunan yakni: Nilai Urgensi (NU) dan Bobot Faktor (BF).
  2. Tingkat dorongan faktor terhadap tujuan pembangunan, yakni: Nilai Dukungan (ND) dan Nilai Bobot Dukungan (NBD).

3. Keterkaitan antar faktor terhadap tujuan pembangunan, yakni: Nilai Keterkaitan (NK), Nilai Rata-rata Keterkaitan (NRK), dan Nilai Bobot Keterkaitan (NBK).

NU, ND, dan NK dinilai menggunakan skala nilai antara 1 – 5 dimana: nilai urgensinya sangat tinggi diberi skor 5; nilai urgensinya tinggi diberi skor 4; nilai urgensinya cukup diberi skor 3; nilai urgensinya kurang diberi skor 2; dan nilai urgensinya sangat kurang diberi skor 1. Sementara dalam penilaian kepentingan faktor penghambat tersebut, penilaian dilakukan sama seperti menentukan faktor pendorong, hanya skor yang digunakan terbalik.

Untuk memperoleh nilai BF adalah melalui  $NU/TNU \times 100\%$ . Kemudian NU dan BF faktor pendorong dan penghambat dicantumkan ke dalam kolom yang telah ditentukan seperti pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2 Evaluasi Faktor Pendorong dan Penghambat

No	Faktor Pendorong dan Penghambat	NU	BF	ND	NBD	NK						NRK	NBK	TNB	FKK	
						D1	D2	Dn	H1	H2	Hn					
D1																
D2																
Dn																
H1																
H2																
Hn																

Sumber: Sianipar dan Entang, 2003

Perhitungan nilai NBD diperoleh dari  $ND \times BF$ . Perhitungan nilai NRK diperoleh dari  $TNK/(N-1)$ . TNK sendiri adalah jumlah nilai keterkaitan satu faktor dengan yang lainnya dengan N merupakan jumlah faktor pendorong dan penghambat. Kemudian perhitungan nilai NBK diperoleh dari  $NRK \times BF$ , sementara TNB diperoleh dari NBD ditambah NBK. Setelah nilai semua komponen diperoleh maka kemudian digunakan Faktor Kunci Keberhasilan (FKK). FKK sendiri adalah faktor-faktor kunci yang strategis. Cara menentukan FKK adalah yakni memilih 2 faktor pendorong dan 2 faktor penghambat, dengan ketentuan sebagai berikut (Sianipar & Entang, 2003):

1. Pilih 2 faktor penghambat dan 2 faktor pendorong yang Nilai Total Bobot Faktor (TNB) terbesar.
2. Apabila TNB beberapa atau semua faktor bernilai sama maka pilih BF yang terbesar.
3. Apabila BF bernilai sama maka pilih Nilai Bobot Dukung (NBD) yang terbesar.
4. Apabila NBD bernilai sama maka dipilih Nilai Bobot Keterkaitan (NBK) yang terbesar.
5. Apabila NBK bernilai sama maka pilihan didasari pada pertimbangan dan pengalaman yang relevan dan rasional.

Sedangkan untuk menjawab tujuan penelitian yang ketiga digunakan analisis deskriptif kuantitatif seperti pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Faktor Bobot dan Skor Penggunaan Kekuatan Partisipasi

No.	Variabel	Unit	Interval	Score	Weight	Max Score Total
1.	Keluasan Partisipasi	%	≤24	1	25	100
2.	Kedalaman Partisipasi	%	25-49	2	25	100
3.	Saluran Partisipasi	%	50-74	3	25	100
4.	Keterpaduan Partisipasi	%	≥75	4	25	100
	Total				100	400

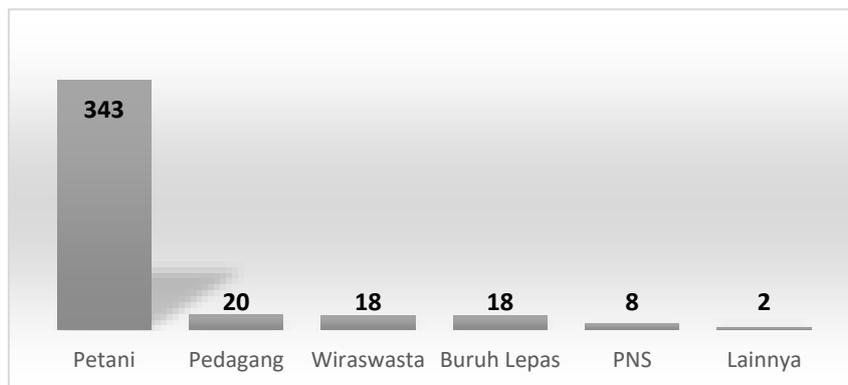
Sumber: Yonis, 2016

Masing-masing variabel memiliki bobot 25, dengan interval mulai dibawah 24 hingga diatas 75. Pemberian skor dalam setiap variabel, yakni: Interval  $\leq 24$  diberi skor 1; Interval 25 – 49 diberi skor 2; Interval 50 – 74 diberi skor 3; dan Interval  $\geq 75$  diberi skor 4.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Potensi Pertanian Desa Tumih

Desa Tumih menjadi salah satu desa yang digarap untuk mengakomodir penduduk transmigran melalui program Kota Terpadu Mandiri pada tahun 1960an. Potensi lahan yang digarap sangat besar dikarenakan lahan mineral bergambut sehingga cocok untuk pertanian seperti padi dengan tumpang-sari jeruk, karet dan palawija. Kondisi alam ini kemudian membuat Desa ini sejak awal keberadaannya di tahun 1979 menjadikan sektor pertanian sebagai mata pecaharian utama sebagian besar penduduknya. Data dari kantor desa, bahwa mayoritas masyarakat Desa Tumih sebanyak 86% dari total masyarakat adalah petani khususnya petani padi.



Gambar 3 Pekerjaan Penduduk Desa Tumih, Agustus 2021  
Sumber : Kantor Desa Tumih, 2021

Selanjutnya, Gambar 4 menggambarkan jenis pertanian yang digarap oleh para petani Desa Tumih adalah padi, jeruk, karet dan palawija. Namun, tidak semua petani di Desa Tumih memiliki lahan sendiri untuk digarap. Beberapa diantaranya bekerja menggarap lahan orang lain, baik masyarakat desa Tumih maupun bukan. Adapun pembagian petani berdasarkan jenis komoditas pertanian dan penguasaan lahan atas pertanian di Desa Tumih. Rata-rata lahan yang menjadi milik sendiri adalah 1-2 hektar sementara untuk lahan orang lain yang di garap petani berkisar lebih dari 2 hektar. Sebagian petani pemilik lahan juga menggunakan jasa petani penggarap untuk membantu aktivitas produksi mereka. Sebesar 60% petani menggarap sendiri lahan miliknya, sementara 30% petani dan pemilik melaksanakan kegiatan produksi lahan pertanian bersama, dan sisanya sekitar 10% menggarap lahan pertanian milik orang lain baik merupakan masyarakat Desa Tumih ataupun bukan. Kondisi karakteristik pertanian tersebut membuat Kabupaten Barito Kuala, dimana Desa Tumih berada menjadi kabupaten penghasil padi terbesar di Kalimantan Selatan dengan jumlah panen Kabupaten Barito Kuala tahun 2018 sebesar lebih dari 263 ribu ton gabah kering giling (Sensus Pertanian, 2018). Dari 17 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Wanaraya sendiri termasuk penghasil padi paling sedikit setelah kecamatan Kuripan yakni sebesar 10.945 ton di tahun 2018 atau hanya sekitar 3 persen dari total produksi padi di kabupaten Barito Kuala, padahal potensinya sangat melimpah dengan karakteristik lahan dan

SDM yang tidak memiliki perbedaan yang jauh dengan kecamatan lainnya di Barito Kuala.

Desa Tumih sendiri memiliki lima Kelompok Tani yakni Kelompok Tani Sumber Rezeki 35 anggota, Kelompok Tani Suka Maju 32 anggota, Kelompok Tani Suka Jadi 42 anggota, Kelompok Tani Bangun Tani 56 anggota, dan Kelompok Tani Bina Mandiri 16 anggota. Secara umum desa Tumih adalah wilayah yang geografisnya merupakan dataran sedang yakni 1 meter diatas permukaan air laut. Desa Tumih memiliki luas wilayah kurang lebih 642,5 ha dengan lahan produktif sebesar 632 ha. Sebagian besar lahan produktif diusahakan untuk pertanian khususnya pertanian padi. Dari 632 ha lahan produktif tersebut sebesar 489 ha atau sekitar 77,4 persen digunakan untuk persawahan. Sementara itu jumlah penduduk Desa Tumih adalah 766 jiwa pada Agustus 2021.

Tabel 4 Kelompok Tani Desa Tumih Tahun 2021

No. Kel. Tani		Nama			Jumlah		Luas Lahan (Ha)	Pola Usaha Tani
		Ketua	Sekretaris	Bendahara	Anggota	Sawah Tegal	Pekarangan	
1	Sumber Rejeki	Sugihono	Sudrajat	Edy Susrajat	35	73		Padi
2	Suka Maju	Fahmi	Safrudin	Paimin	32	51		Padi
3	Suka Jadi	Syahrani	Mahrur	Sutanto	42	73		Padi
4	Bangun Tani	Marjani	Bahrani	Hamdani	56	73		Padi
5	Bina Mandiri	M. Sami'in	A. Soleh	Kurniawan	16	26		Padi

Sumber: UPTD Pertanian Kecamatan Wanaraya, 2021

Mayoritas penduduk Desa Tumih bekerja di sektor pertanian dengan jumlah 296 jiwa dengan tiga kategori, yakni pertanian lahan sawah (489 ha), lahan tegal (111 ha), dan pekarangan (32 ha). Untuk pertanian lahan sawah sejauh ini hanya 296 ha atau 60,5% yang terdaftar dalam kelompok tani. Sisanya termasuk lahan penduduk yang tidak termasuk kelompok tani dan sebagiannya belum dikelola atau hanya berupa lahan kosong yang sebenarnya produktif. Sementara itu sistem pengairan sawah seluruhnya menggunakan tadah hujan dan ini sekaligus menjadi penghambat pengembangan sektor pertanian sawah di desa ini. Desa Tumih memiliki potensi pertanian yang baik dan didukung dengan adanya kelembagaan kelompok tani. Hingga tahun 2021 terdapat lima kelompok tani dengan kondisi aktif. Dari hasil wawancara mendalam kepada lima kelompok tani di Desa Tumih diperoleh hasil bahwa potensi pertanian yang ada adalah tanaman pangan berupa padi. Kondisi pertanian di Desa Tumih sangat minim serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) untuk seluruh jenis pertanian yang ada. Selain menghasilkan padi sebagai komoditas, sebenarnya Desa Tumih juga menghasilkan jeruk, karet dan tanaman palawija serta sayur mayur. Untuk komoditas jeruk sebenarnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan mengingat jenis jeruk yang di produksi cukup diminati di wilayah provinsi Kalimantan Selatan karena rasanya yang manis, yakni jenis jeruk manis dengan nama latin *Citrus Sinensis*. Namun, karena jeruk tergolong komoditas yang cepat busuk maka masyarakat belum banyak yang mengoptimalkan potensi pertanian jeruk ini. Selain itu tidak seperti padi/gabah dimana dapat disimpan dalam waktu lama, masyarakat juga belum memiliki pasar yang baik untuk memasarkan produksi jeruk mereka. Selain potensi alam, Desa Tumih juga memiliki SDM yang melimpah. Banyak masyarakat yang memiliki keahlian bertani, khususnya pertanian padi.

#### 4.2 Strategi Pengembangan Pertanian Desa Tumih

Menurut Indrayani dan Nurkholis (2001) strategi adalah rencana yang sifatnya umum dan luas serta memiliki orientasi masa akan datang. Meski demikian dan perencanaan dan strategi pembangunan tetap harus disusun secara spesifik dan detil agar tepat dan efektif. Strategi atau perencanaan sendiri dapat berasal dari pemerintah ataupun dari pihak petani dan masyarakat terkait pertanian sebagai pelaku utama usaha. Hasil analisis FFA terhadap pengembangan pembangunan Pertanian Desa Tumih menemukan faktor pendorong dan penghambat utama yang dijelaskan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5 Identifikasi Faktor Pendorong dan Penghambat Upaya Pengembangan Potensi Pertanian di Desa Tumih

No.	Faktor Pendorong	TNB	No.	Faktor Penghambat	TNB
<b>Kekuatan</b>			<b>Kelemahan</b>		
D1	Potensi alam melimpah	1,85	H1	Pengairan pertanian padi sulit	3.06*
D2	Lahan yang subur	1,85	H2	Kurang efektifnya penyuluh pertanian	2.88
D3	SDM pertanian melimpah	1,89*	H3	Kelembagaan desa minim	2.70
			H4	Toko perlengkapan dan peralatan (termasuk bibit, pupuk, obat pertanian) minim	2.88
<b>Total Kekuatan</b>		<b>5,58</b>	<b>Total Kelemahan</b>		<b>11,52</b>
<b>Peluang</b>			<b>Tantangan</b>		
D4	Pasar produk pertanian luas	1,81	H5	Teknologi pertanian minim	2,88*
D5	Petani terbuka dengan teknologi baru	1,85*	H6	Bencana banjir	2,88
D6	Meluasnya pemasaran produk pertanian secara digital	1,81	H7	Meluasnya alih fungsi lahan pertanian	2,82
<b>Total peluang</b>		<b>5,47</b>	<b>Total tantangan</b>		<b>8,58</b>
<b>Total peluang</b>		<b>11,05</b>	<b>Total penghambat</b>		<b>20,10</b>

Sumber: Data Primer, 2021

Tabel 5 menjelaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan pertanian di Desa Tumih, faktor penghambat cenderung lebih dominan dibandingkan faktor pendorong sehingga perlu kerja keras untuk menghilangkan atau meminimalkan faktor penghambat utama agar faktor pendorong utama dapat optimal. Kedua faktor penghambat pengairan pertanian yang kurang memadai (H1) dan Teknologi pertanian yang minim (H5) menjadi faktor yang jika dibiarkan akan melemahkan dan mungkin mengancam keberlangsungan pertanian padi di Desa Tumih. Pengairan sawah yang selama ini hanya mengandalkan tadah hujan menyebabkan produktivitas padi tidak dapat maksimal dan petani sangat tergantung dengan cuaca. Jika memasuki musim panas dengan intensitas curah hujan yang sangat minim maka sawah petani akan mengalami kekeringan yang akan berdampak pada gagal panen.

Kemudian faktor penghambat kedua adalah teknologi yang digunakan pertanian masih belum memadai. Jenis teknologi yang digunakan petani padi di Desa Tumih sementara ini hanya alat perontok/pemanen padi manual atau disebut DOS, dan traktor. Sementara faktor pendorong pengembangan pertanian padi di Desa Tumih adalah sumber daya manusia di sektor pertanian padi sangat besar jumlahnya. Hampir seluruh

penduduk di Desa Tumih memiliki keahlian dalam mengelola pertanian padi. Selain SDM melimpah, hasil perhitungan FFA juga menyatakan bahwa selain memiliki keahlian mengelola pertanian khususnya pertanian padi, penduduk Desa Tumih juga terbuka akan teknologi baru. Dimana, penduduk Desa Tumih akan sangat merespon dengan baik jika ada teknologi baru di sektor pertanian yang dapat di aplikasikan. Penduduk menyatakan bersedia untuk mempelajari tata cara penggunaan teknologi yang disiapkan pemerintah untuk pengembangan sektor pertanian.

Alternatif perencanaan atau strategi dalam upaya pengembangan potensi pertanian di Desa Tumih diantaranya: 1) Membuat sistem pengairan jangka panjang yang dapat mengairi sawah-sawah petani dan tidak menutup kemungkinan untuk jenis pertanian lain yang potensial dikembangkan; 2) Memperkenalkan dan mendorong upaya penyediaan teknologi baru yang lebih efektif dan efisien dalam sektor pertanian. Adapun faktor penghambat lain berdasarkan hasil wawancara dengan *key responden* memiliki bobot TNB yang tidak terpaut jauh dengan dua faktor penghambat utama, yakni kurang aktifnya penyuluh pertanian yang bertugas memberikan penyuluhan pertanian di Desa Tumih, masih minimnya toko yang menjual perlengkapan dan peralatan pertanian termasuk bibit, pupuk dan obat serta ancaman bencana banjir yang juga menghambat pengembangan sektor pertanian khususnya pertanian padi yang dominan di Desa Tumih.

#### 4.3 Kekuatan Partisipasi Kelompok Tani dalam Pengembangan Sektor Pertanian di Desa Tumih

Hasil analisis kekuatan partisipasi masyarakat terkait pertanian di Desa Tumih menunjukkan nilai yang lemah padahal potensi kekuatan lebih besar. Hasil penilaian keluasan partisipasi dalam penelitian ini ditunjukkan melalui kuantitas atau frekuensi keterlibatan *stakeholder* dalam wadah forum perencanaan baik ditingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Dari hasil perhitungan hanya sekitar 40% luas keterlibatan masyarakat terkait pertanian dalam forum perencanaan pembangunan.

Tabel 6 Keluasan Keterlibatan Kelompok Tani Terkait Pertanian dan Instansi Pemerintah dalam Forum Perencanaan Pembangunan Pertanian di Desa Tumih, Tahun 2019-2020.

No	Forum Perencanaan Pembangunan Pertanian	Keterlibatan Stakeholder							
		Masyarakat Terkait Pertanian				Instansi Pemerintah			
		KT	LPP	PS	UTP	IPP	IP	FP	ITP
1.	Musrenbang Desa	1	0	0	1	0	0	1	0
2.	Musrenbang Kecamatan	1	0	0	0	1	1	0	1
3.	Musrenbang Pertanian Kabupaten	1	0	0	0	1	1	1	0
4.	Forum SKPD Kabupaten	0	0	0	0	1	1	0	1
5.	Musrenbang Kabupaten	0	0	0	0	1	1	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Sumber: Diolah Dari Hasil Observasi, Interview dan Dokumentasi, 2021

Keterangan:

1	=	Ada	0	=	Tidak Ada
KT	=	Kelompok Tani	IP	=	Instansi Pertanian
IPP	=	Instansi Pengelola Perencanaan	FP	=	Tenaga Fungsional Pertanian
LPP	=	Lembaga Pembiayaan Pertanian	UTP	=	Usaha Terkait Produk Pertanian
PS	=	Distributor	ITP	=	Instansi Terkait Pertanian

Forum perencanaan pembangunan pertanian di tingkat Desa masih belum maksimal dimana kurangnya keterlibatan instansi pengelola perencanaan, instansi dari pertanian dan instansi pertanian. Berdasarkan hasil wawancara dengan *key responden* ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten, tidak kuatnya hubungan yang terbangun antara masyarakat terutama kelompok tani dengan instansi pengelola pertanian baik ditingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Masalah ini menimbulkan kesulitan dalam mengintegrasikan pengalaman dan pengetahuan kelompok tani di lapangan dengan pengetahuan teoritis dan teknis dari instansi pertanian demi mewujudkan perencanaan pembangunan yang sistemik dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, ada sepuluh tahapan perencanaan pembangunan pertanian di Desa Tumih yang digunakan sebagai indikator pengukuran tingkat kedalaman keterlibatan *stakeholder* dalam perencanaan pembangunan (Yonis, 2016). Sepuluh indikator pengukuran tingkat kedalaman keterlibatan ini dimulai dari tahap perumusan masalah apa saja yang dialami masyarakat tani secara langsung dan apa saja kebutuhan yang mereka perlukan agar aktivitas tani dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan, hingga perumusan pemanfaatan dan pemeliharaan segala hasil kegiatan yang telah dilaksanakan masyarakat yang merupakan implementasi rencana pembangunan pertanian. Dalam sepuluh indikator yang dapat dilihat pada Tabel 7 ini harus melibatkan tidak hanya pemerintah terkait tetapi juga masyarakat tani itu sendiri.

Tabel 7 Kedalaman Keterlibatan Masyarakat Tani dan Pemerintah terkait dalam Proses Perencanaan Pembangunan Pertanian di Desa Tumih, Tahun 2019-2020

No.	Uraian Tahapan Proses Perencanaan Pembangunan Pertanian	PD	PKe	PKa
1.	Perumusan masalah dan kebutuhan	1	1	1
2.	Perumusan tujuan dan sasaran	1	0	0
3.	Perumusan alternative-alternatif program kerja	1	0	0
4.	Perumusan skala prioritas	1	0	0
5.	Perumusan secara terperinci terkait kegiatan	0	0	0
6.	Penetapan jenis kegiatan	0	0	0
7.	Perumusan persiapan pelaksanaan	0	0	0
8.	Perumusan mekanisme dan system pengawasan	0	0	0
9.	Perumusan evaluasi dan perbaikan kegiatan	0	0	0
10.	Perumusan pemanfaatan dan pemeliharaan hasil kegiatan	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Sumber: Hasil Observasi, Interview dan Dokumentasi, 2021

Keterangan:

- 1 = Ada
- 0 = Tidak Ada
- PKa = Perencanaan Tingkat Kabupaten
- PD = Perencanaan Tingkat Desa
- PKe = Perencanaan Tingkat Kecamatan

Kekuatan saluran partisipasi baik dalam forum formal seperti pertemuan rutin maupun melalui media sosial seperti penggunaan grup whatsapp, telegram maupun media lainnya juga merupakan cara menilai kekuatan partisipasi. Di era digital forum perencanaan formal seperti musrembang baik ditingkat desa hingga kabupaten cenderung membatasi saluran partisipasi, sehingga penggunaan saluran non formal menjadi penting.

Tabel 8 Penggunaan Saluran Partisipasi Kelompok Tani dalam Proses Perencanaan Pembangunan Pertanian di Desa Tumih, Tahun 2019-2020

No.	Saluran Partisipasi Masyarakat	Jumlah Ruang Partisipasi	Ruang Partisipasi	
			Masyarakat	Pemerintah
1.	Wadah Perencanaan (forum formal)	7	2	5
2.	Media Perencanaan (informasi & teknologi komunikasi)	6	0	6
<b>Jumlah</b>			<b>13</b>	

Sumber: Diolah dari Observasi dan Dokumentasi, 2021

Forum non formal melalui media teknologi, komunikasi dan informasi belum ada di dalam lingkup kelompok petani, namun di lingkup pemerintah ada Sembilan yakni, 1) Grup *Whatsapp* antara aparat desa dan seluruh kelompok tani dan penyuluh pertanian, 2) Grup *Whatsapp* tingkat kecamatan yang memuat ketua kelompok tani di Desa, UPTD pertanian, dan pemerintah Desa sekecamatan yang bertugas mengelola pertanian, 3) Grup *Whatsapp* antara UPTD pertanian tingkat kecamatan dengan SKPD pertanian di tingkat kabupaten, ketua kelompok tani kecamatan dan Kepala Desa kecamatan 4) Grup *Whatsapp* terkait pertanian di tingkat kabupaten yang melibatkan kepala SKPD pertanian, Instansi terkait pertanian lainnya. 5) Grup *Telegram* tingkat kabupaten yang melibatkan kepala SKPD pertanian, Instansi terkait pertanian lainnya. 6) *Instagram* SKPD pertanian di tingkat kabupaten. Selanjutnya penilaian kekuatan partisipasi dilihat dari keterpaduan masyarakat dengan pemerintah baik ditingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.

Tabel 9 Keterpaduan Keterlibatan Masyarakat Tani dan Instansi Pemerintah dalam Proses Perencanaan Pembangunan Pertanian di Desa Tumih, Tahun 2019-2020

No.	Tingkat Perencanaan Pembangunan Pertanian	Keterpaduan Dalam Proses Perencanaan			
		Masyarakat		Pemerintah	
		Rata-rata	%	Rata-rata	%
1.	Perencanaan Desa	32	10	52	16,25
2.	Perencanaan Kecamatan	11	6,88	41	25,63
3.	Perencanaan Kabupaten	3	2	94	62,67
<b>Jumlah rata-rata</b>		<b>6,29</b>		<b>34,85</b>	

Sumber: Hasil Observasi dan Dokumentasi, 2020

Partisipasi yang rendah dari masyarakat sangat mempengaruhi keakuratan data dan informasi dalam tujuan perencanaan dan kualitas perencanaan, sedangkan peningkatan kualitas dan keterpaduan perencanaan yang efektif dan efisien sangat dipengaruhi oleh partisipasi pemerintah yang terkait. Tabel 9 merupakan hasil perhitungan dalam penelitian ini dapat disimpulkan kekuatan partisipasi *stakeholder* berdasarkan penilaian keluasan, kedalaman, saluran partisipasi yang digunakan, dan keterpaduan pemerintah dan masyarakat terkait pertanian dalam perencanaan pembangunan pertanian di Desa Tumih.

Tabel 10 Kekuatan Partisipasi *Stakeholder* dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Tumih, tahun 2019-2020

No.	Indikator/Sub Dalam Perencanaan Pembangunan Pertanian	Perencanaan Pembangunan			
		%	Nilai Skor	Bobot	Jumlah Skor
1.	Keluasan Partisipasi	40,00	2	25	50
2.	Kedalaman Partisipasi	20,00	1	25	25
3.	Saluran Partisipasi	18,19	1	25	25
4.	Keterpaduan Partisipasi	18,05	1	25	25
<b>Jumlah</b>				<b>100</b>	<b>125</b>

Sumber: Hasil Rekapitulasi Data Primer, 2022

Tabel 10 menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat tani terkait pertanian dalam pembangunan pertanian di Desa Tumih masih tergolong rendah yakni dengan skor 125 dari skor maksimal 400 atau hanya sekitar 31,25%. Kondisi ini menjelaskan bahwa 68,75% perencanaan pembangunan pertanian di Desa Tumih dilaksanakan tanpa partisipasi masyarakat khususnya kelompok tani di Desa Tumih. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah mulai tingkat Desa hingga Kabupaten. Hasil perhitungan di atas menggambarkan bahwa ruang yang memadai dalam forum perencanaan pembangunan pertanian belum tersedia. Melalui pendekatan partisipatif yang sebenarnya seharusnya mampu memecahkan masalah tersebut dan memberikan keluasan dan kedalaman partisipasi masyarakat terkait pertanian dalam perencanaan pembangunan pertanian. Hasil penelitian ini juga menjelaskan kurangnya pemberdayaan kekuatan kelembagaan masyarakat tani termasuk dalam pemanfaatan media massa dan elektronik untuk membangun saluran perencanaan pembangunan pertanian. Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa: 1) Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terkait pertanian dalam kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan baik ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten. 2) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat terkait pertanian dalam proses perencanaan pembangunan pertanian mulai tahap perencanaan hingga evaluasi. 3) Masih kurangnya keterlibatan masyarakat terkait pertanian dalam forum-forum formal dan non formal termasuk penggunaan media informasi, dan telekomunikasi. 4) Masih kurangnya tingkat keterpaduan antara masyarakat terkait pertanian dengan pemerintah yang terkait dalam perencanaan pembangunan pertanian. Hal ini diharapkan dapat menjadi kajian bagi instansi terkait dalam perencanaan pembangunan kedepannya agar tujuan dan sasaran pembangunan pertanian khususnya dalam hal mensejahterakan masyarakat tani di Desa Tumih dapat terealisasi. Hasil penelitian ini telah dikuatkan oleh hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu hasil penelitian Norona, Burman, dan Mills pada tahun 2021 yakni fokusnya pada penelitian terdahulu yang juga menggunakan metode yang sama dengan penelitian ini.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan maka kesimpulannya adalah potensi pertanian yang dimiliki Desa Tumih adalah jumlah lahan produktif yang besar dapat dikatakan sangat baik khususnya untuk pertanian padi. Potensi pertanian lain diantaranya jeruk, karet dan tanaman palawija. Adapun faktor pendorong yakni ketersediaan SDM yang

mampu mengelola pertanian banyak serta para petani yang terbuka akan teknologi baru yang diterapkan di Desa Tumih. Sementara faktor penghambat yakni sistem pengairan pertanian padi yang menjadi sektor mayoritas di Desa Tumih masih menggunakan tadah hujan dan ini dianggap sebagai penghambat pembangunan pertanian di Desa Tumih serta teknologi yang dimiliki petani masih minim. Sementara itu, tingkat partisipasi masyarakat terkait pertanian di Desa Tumih masih rendah dengan tingkat kekuatan partisipasi hanya sebesar 36,5 persen.

Hasil penelitian diatas dapat menjadi pertimbangan bagi *stakeholders* terkait, dimana pemerintah dan masyarakat terkait dapat mulai melakukan jenis pertanian potensial lainnya selain padi untuk mengisi lahan yang masih belum digarap tentunya dengan riset mengenai jenis usaha tani yang akan dilaksanakan tersebut agar dapat terlaksana dengan baik dan memberi manfaat bagi seluruh pihak khususnya petani di Desa Tumih. Faktor ketersediaan SDM dalam mengelola pertanian yang melimpah harus dimanfaatkan dengan baik. Berbagai bentuk stimulan dapat dilaksanakan agar SDM ini mampu mengelola pertanian dengan lebih efisien dan efektif baik dengan memberikan teknologi canggih tepat guna kepada mereka agar mampu meningkatkan produktivitas. Hal ini akan sangat berguna dikarenakan keterbukaan masyarakat tani di Desa Tumih terhadap teknologi baru. Dengan demikian, hambatan minimnya teknologi juga dapat teratasi. Sementara itu, faktor penghambat lain yang tidak bisa diabaikan adalah minimnya pengairan, maka, disini peran pemerintah sangat penting, dengan memberikan pengairan yang baik untuk lahan-lahan pertanian. Terkait partisipasi masyarakat tani dalam perencanaan pembangunan harus ditingkatkan dengan pelibatan mereka dalam forum-forum perencanaan baik formal maupun non-formal. Saran untuk penelitian yang akan datang (*future research*) ialah untuk sampel dapat diperluas pada desa-desa yang terdapat di Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tabalong, kemudian hasil penelitiannya dapat di komparasi untuk setiap Kabupaten.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Badan Pusat Statistik (2019) Hasil Survey Pertanian Antar Sensus (SUTAS) Tahun 2018
- Badan Pusat Statistik (2021) Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Ekonomi Utama Tahun 2020
- Badan Pusat Statistik (2011) Tabel Input-Output Indonesia Tahun 2010
- Chambers, R. (1996). *PRA Participatory Rural Appraisal: Memahami Desa Secara Partisipatif* (6th ed.). Yogyakarta: Kanisius kerjasama dengan Yayasan Mitra Tani Yogyakarta.
- Arsyad, L. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta. STIM YKPN.
- Cline, W. R. (2007). *Global Warming and Agriculture: Impact Estimates by Country*. Washington D.C: Peterson Institute for International Economics.
- Hoff, K. (2008). Joseph E. Stiglitz. *World Bank*.
- Sianipar, J. P. G., & Entang, H. M. (2003). *Teknik-teknik Analisis Manajemen*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Susilowati, S. H., Hutabarat, B., Rachmat, M., Purwoto, A., Sugiarto, Supriyati, ... PUSAT. (2010). *Indikator Pembangunan Pertanian dan Pedesaan: Karakteristik Sosial Ekonomi Petani dan Usahatani Padi*.
- Todaro, Michael, P. (2010) *Pembangunan Ekonomi Jilid 3*. Jakarta. Erlangga.

**Jurnal :**

- Handoyo, E. (2010). Konversi Lahan Pertanian Ke Non-Pertanian : Fungsi Ekologis yang Terabaikan. *Forum Ilmu Sosial*, 37(2), 118–126.
- Indrayani, M., & Nurkholis. (2001). Persepsi Manajemen Perusahaan terhadap Prinsip-prinsip Good Governance (Studi pada 36 Perusahaan di Indonesia). *TEMA*, 2(2), 136–157.
- Mendelsohn, R. (2008). The Impact of Climate Change on Cgriculture in Developing Countries. *Journal of Natural Resources Policy Research*, 1(1), 5–19. <https://doi.org/10.1080/19390450802495882>
- Mellor, J. W. (2001). Employment Multipliers from Agricultural Growth and Poverty Reduction. *The Pakistan Development Review*, 40(1), 371–400. <https://doi.org/10.30541/v40i4ipp.371-400>
- Rahadian, A. S. (2010). Pertanian Terpadu dan Aspek Ketenagakerjaan di Perdesaan. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 36(2), 267–285.
- Ramlawati. (2020). Peranan Sektor Pertanian dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli. *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 173–193.
- Rosenzweig, C., & Parry, M. L. (1994). Potential Impact of Climate Change on World Food Supply. *Nature*, 367(January), 133–138.
- Sihombing, Y. (2022). Kebijakan Pembangunan Pertanian Berbasis Inovasi Teknologi sebagai Upaya Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Strategis dan Pendapatan Petani Mendukung Ketahanan Pangan. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis VI*, 6(1), 137–143.
- Steg, L. (2005). Environmental Problems and Human Behavior, 2nd edition. *Journal of Environmental Psychology*, 25(1), 120–123. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2005.01.003>
- Stern, P. C. (2000). New Environmental Theories: Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior. *Journal of Social Issues*, 56(3), 407–424. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/0022-4537.00175>
- Yonis, R. (2016). Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Pertanian (Studi Kasus Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Pembangunan Nagari*, 1(2), 71–88.

**Sumber Web :**

- Peraturan Menteri Pertanian. (2013). *Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2013*. Jakarta: Kementerian Pertanian. Retrieved from [https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT\\_Globalization\\_Report\\_2018.pdf%0Ahttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India\\_globalisation%2C\\_society\\_and\\_inequalities%28lsero%29.pdf%0Ahttps://www.quora.com/What-is-the](https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf%0Ahttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation%2C_society_and_inequalities%28lsero%29.pdf%0Ahttps://www.quora.com/What-is-the)

**Dokumen lainnya :**

- Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan Wanaraya (2021) Data Kelompok Tani Desa Tumih